

UPDATE PER TANGGAL 4 Maret 2024

		75.949		55.923	55.635	49.233	25.143	6	3.296	3.624
KODE	INSTANSI	JENIS PENGADAAN	FORMASI	LULUS PASCA OPTIMALISASI	ISI DRH	USUL MASUK	NIP	TMS	BTS	SK
1010	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	PPPK Teknis	38	16	16	16	16	-	-	-
1020	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	PPPK Teknis	39	27	27	27	27	-	-	-
2010	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	PPPK Teknis	67	64	64	64	63	-	-	-
2050	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPPK Teknis	89	66	66	66	66	-	-	-
2060	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	PPPK Teknis	17	12	12	12	12	-	-	12
2100	Kementerian Pemuda dan Olahraga	PPPK Teknis	101	85	85	85	55	-	4	-
2120	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	PPPK Teknis	99	79	79	79	78	-	-	-
3001	Kementerian Dalam Negeri	PPPK Teknis	85	56	56	56	-	-	-	-
3002	Kementerian Luar Negeri	PPPK Teknis	86	77	77	77	68	-	1	-
3003	Kementerian Pertahanan	PPPK Teknis	645	256	256	256	167	-	29	-
3004	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	PPPK Teknis	1.323	748	745	745	745	-	-	-
3005	Kementerian Keuangan	PPPK Teknis	213	77	76	76	76	-	-	74
3006	Kementerian Pertanian	PPPK Teknis	118	78	78	78	77	-	1	-
3008	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PPPK Teknis	190	161	156	-	-	-	-	-
3009	Kementerian Perhubungan	PPPK Teknis	966	327	289	289	256	-	8	-
3010	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	PPPK Teknis	3.210	1.601	1.586	-	-	-	-	-
3011	Kementerian Kesehatan	PPPK Teknis	707	470	470	-	-	-	-	-
3012	Kementerian Agama	PPPK Teknis	3.833	3.620	3.604	3.575	-	-	1	-
3013	Kementerian Ketenagakerjaan	PPPK Teknis	319	213	213	213	-	-	-	-
3014	Kementerian Sosial	PPPK Teknis	66	40	39	-	-	-	-	-
3015	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PPPK Teknis	5.267	4.128	4.109	3.863	320	5	164	-
3016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PPPK Teknis	714	633	628	621	617	-	1	617
3018	Kementerian Komunikasi dan Informatika	PPPK Teknis	1.279	790	789	789	789	-	-	783
3019	Kementerian Perdagangan	PPPK Teknis	147	132	131	131	117	-	11	-
3020	Kementerian Perindustrian	PPPK Teknis	521	377	377	371	195	-	114	-
3021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PPPK Teknis	3.019	2.027	2.025	2.025	1.905	-	48	-
3022	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonom	PPPK Teknis	293	202	202	202	191	-	1	-
4001	Kementerian Sekretariat Negara	PPPK Teknis	81	68	68	68	68	-	-	-
4004	Sekretariat Jenderal MPR	PPPK Teknis	12	11	11	11	11	-	-	-
4008	Badan Pemeriksa Keuangan	PPPK Teknis	44	43	43	43	43	-	-	-
4009	Setjen WANTANNAS	PPPK Teknis	25	21	21	21	21	-	-	-

KODE	INSTANSI	JENIS PENGADAAN	FORMASI	LULUS PASCA OPTIMALISASI	ISI DRH	USUL MASUK	NIP	TMS	BTS	SK
4010	Badan Siber dan Sandi Negara	PPPK Teknis	41	35	33	33	33	-	-	33
4011	Badan Kepegawaian Negara	PPPK Teknis	149	120	120	120	80	-	12	-
4012	Lembaga Administrasi Negara	PPPK Teknis	12	11	9	9	9	-	-	9
4016	Badan Pusat Statistik	PPPK Teknis	347	188	188	188	186	-	2	-
4017	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	PPPK Teknis	533	329	325	325	-	-	325	-
4018	Arsip Nasional Republik Indonesia	PPPK Teknis	72	63	60	60	60	-	-	60
4019	Badan Informasi Geospasial	PPPK Teknis	126	92	91	91	91	-	-	91
4020	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	PPPK Teknis	2.044	2.007	1.999	1.998	1.928	-	63	1
4021	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	PPPK Teknis	70	25	23	23	23	-	-	-
4023	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PPPK Teknis	255	132	131	130	89	-	14	-
4024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	PPPK Teknis	1.964	1.309	1.295	1.295	-	-	1.295	-
4025	Perpustakaan Nasional RI	PPPK Teknis	117	75	75	75	75	-	-	39
4028	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	PPPK Teknis	34	33	32	-	-	-	-	-
4031	Badan Pengawas Obat dan Makanan	PPPK Teknis	222	161	161	160	160	-	-	159
4032	Lembaga Ketahanan Nasional RI	PPPK Teknis	32	14	14	14	14	-	-	-
4033	Kepolisian Negara	PPPK Teknis	257	248	248	248	247	-	-	-
4041	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PPPK Teknis	951	444	437	-	-	-	-	-
4043	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	PPPK Teknis	268	163	161	-	-	-	-	-
4044	Setjen KOMNAS HAM	PPPK Teknis	34	26	26	26	26	-	-	-
4049	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	PPPK Teknis	41	14	14	14	14	-	-	-
4050	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	PPPK Teknis	133	96	96	96	71	-	16	-
4051	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	PPPK Teknis	277	232	232	232	232	-	-	229
4052	Badan Keamanan Laut RI	PPPK Teknis	291	136	136	136	136	-	-	-
4054	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	PPPK Teknis	63	48	48	48	48	-	-	-
4055	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPPK Teknis	35	34	34	34	34	-	-	-
4060	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	PPPK Teknis	34	24	24	24	24	-	-	-
4062	Badan Pengawas Pemilihan Umum	PPPK Teknis	2.598	1.885	1.885	21	-	-	20	-
4065	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis	45	25	25	25	24	-	1	24
4066	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	PPPK Teknis	31	25	16	25	24	-	-	-
4068	Badan Pangan Nasional	PPPK Teknis	95	31	30	30	29	-	-	-
4069	Otorita Ibu Kota Nusantara	PPPK Teknis	355	199	193	193	190	-	1	-
4070	Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	PPPK Teknis	25	17	17	17	12	-	3	-
6300	Pemerintah Daerah D I Yogyakarta	PPPK Teknis	110	85	84	84	84	-	-	-
6301	Pemerintah Kab. Bantul	PPPK Teknis	85	76	76	76	72	-	1	-

KODE	INSTANSI	JENIS PENGADAAN	FORMASI	LULUS PASCA OPTIMALISASI	ISI DRH	USUL MASUK	NIP	TMS	BTS	SK
6302	Pemerintah Kab. Sleman	PPPK Teknis	119	105	105	105	105	-	-	105
6303	Pemerintah Kab. Gunung Kidul	PPPK Teknis	120	101	100	100	42	-	1	-
6304	Pemerintah Kab. Kulon Progo	PPPK Teknis	82	71	71	71	-	-	-	-
6371	Pemerintah Kota Yogyakarta	PPPK Teknis	61	57	57	57	57	-	-	-
6400	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	PPPK Teknis	421	317	313	313	313	-	-	-
6401	Pemerintah Kab. Semarang	PPPK Teknis	46	22	22	22	21	-	-	-
6402	Pemerintah Kab. Kendal	PPPK Teknis	279	217	217	217	216	-	-	-
6403	Pemerintah Kab. Demak	PPPK Teknis	185	158	157	157	-	-	-	-
6404	Pemerintah Kab. Grobogan	PPPK Teknis	216	176	176	176	175	-	1	-
6405	Pemerintah Kab. Pekalongan	PPPK Teknis	69	50	50	50	50	-	-	-
6406	Pemerintah Kab. Batang	PPPK Teknis	95	88	88	88	86	-	-	-
6407	Pemerintah Kab. Tegal	PPPK Teknis	33	31	31	31	31	-	-	-
6408	Pemerintah Kab. Brebes	PPPK Teknis	96	94	94	94	-	-	1	-
6410	Pemerintah Kab. Kudus	PPPK Teknis	85	80	79	79	47	-	30	-
6412	Pemerintah Kab. Jepara	PPPK Teknis	86	53	53	53	8	-	-	-
6413	Pemerintah Kab. Rembang	PPPK Teknis	124	107	107	107	106	-	-	-
6414	Pemerintah Kab. Blora	PPPK Teknis	457	367	367	367	287	-	2	-
6415	Pemerintah Kab. Banyumas	PPPK Teknis	146	128	128	128	-	-	-	-
6416	Pemerintah Kab. Cilacap	PPPK Teknis	145	119	119	117	116	-	1	-
6418	Pemerintah Kab. Banjarnegara	PPPK Teknis	148	128	128	128	-	-	-	-
6419	Pemerintah Kab. Magelang	PPPK Teknis	144	122	121	121	-	-	-	-
6420	Pemerintah Kab. Temanggung	PPPK Teknis	5	4	4	4	-	-	-	-
6421	Pemerintah Kab. Wonosobo	PPPK Teknis	169	129	128	128	24	-	-	-
6422	Pemerintah Kab. Purworejo	PPPK Teknis	80	61	61	-	-	-	-	-
6423	Pemerintah Kab. Kebumen	PPPK Teknis	116	110	110	110	110	-	-	-
6425	Pemerintah Kab. Boyolali	PPPK Teknis	14	12	12	12	12	-	-	-
6426	Pemerintah Kab. Sragen	PPPK Teknis	137	83	83	83	13	-	-	-
6427	Pemerintah Kab. Sukoharjo	PPPK Teknis	158	142	142	142	10	-	-	-
6428	Pemerintah Kab. Karanganyar	PPPK Teknis	20	19	19	19	2	-	-	-
6471	Pemerintah Kota Semarang	PPPK Teknis	31	20	20	20	20	-	-	-
6472	Pemerintah Kota Salatiga	PPPK Teknis	20	20	20	20	18	-	-	-
6473	Pemerintah Kota Pekalongan	PPPK Teknis	33	32	32	31	31	-	-	-
6475	Pemerintah Kota Magelang	PPPK Teknis	89	55	54	54	53	-	-	-
6476	Pemerintah Kota Surakarta	PPPK Teknis	110	106	106	106	106	-	-	-

KODE	INSTANSI	JENIS PENGADAAN	FORMASI	LULUS PASCA OPTIMALISASI	ISI DRH	USUL MASUK	NIP	TMS	BTS	SK
6500	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	PPPK Teknis	729	657	651	650	387	-	20	-
6501	Pemerintah Kab. Gresik	PPPK Teknis	39	36	36	36	30	-	1	-
6504	Pemerintah Kab. Jombang	PPPK Teknis	57	54	54	54	53	-	-	-
6506	Pemerintah Kab. Pamekasan	PPPK Teknis	56	50	50	50	49	-	1	-
6507	Pemerintah Kab. Sumenep	PPPK Teknis	64	50	50	50	49	-	1	-
6508	Pemerintah Kab. Bangkalan	PPPK Teknis	65	51	51	51	2	-	-	-
6511	Pemerintah Kab. Banyuwangi	PPPK Teknis	65	59	59	59	58	-	1	-
6512	Pemerintah Kab. Jember	PPPK Teknis	109	89	89	89	21	-	7	-
6513	Pemerintah Kab. Malang	PPPK Teknis	358	264	264	264	52	-	33	-
6514	Pemerintah Kab. Pasuruan	PPPK Teknis	80	46	45	45	-	-	-	-
6515	Pemerintah Kab. Probolinggo	PPPK Teknis	123	73	73	73	41	-	2	-
6516	Pemerintah Kab. Lumajang	PPPK Teknis	80	76	76	76	76	-	-	-
6517	Pemerintah Kab. Kediri	PPPK Teknis	30	30	30	30	29	-	-	-
6518	Pemerintah Kab. Tulungagung	PPPK Teknis	197	153	153	153	128	-	1	-
6519	Pemerintah Kab. Nganjuk	PPPK Teknis	100	95	95	95	94	-	-	-
6520	Pemerintah Kab. Trenggalek	PPPK Teknis	95	80	79	77	60	-	-	-
6521	Pemerintah Kab. Blitar	PPPK Teknis	181	80	78	78	4	-	3	-
6522	Pemerintah Kab. Madiun	PPPK Teknis	58	46	46	46	17	-	9	-
6524	Pemerintah Kab. Magetan	PPPK Teknis	119	98	97	97	87	-	-	-
6525	Pemerintah Kab. Ponorogo	PPPK Teknis	214	133	130	130	59	-	3	-
6526	Pemerintah Kab. Pacitan	PPPK Teknis	92	70	67	67	46	-	3	-
6527	Pemerintah Kab. Bojonegoro	PPPK Teknis	182	158	158	-	-	-	-	-
6528	Pemerintah Kab. Tuban	PPPK Teknis	107	73	71	71	-	-	1	-
6529	Pemerintah Kab. Lamongan	PPPK Teknis	208	174	173	173	140	-	9	-
6571	Pemerintah Kota Surabaya	PPPK Teknis	495	480	477	475	191	-	2	-
6572	Pemerintah Kota Mojokerto	PPPK Teknis	40	25	25	25	17	-	7	-
6573	Pemerintah Kota Malang	PPPK Teknis	21	21	21	21	21	-	-	-
6574	Pemerintah Kota Pasuruan	PPPK Teknis	29	20	20	20	5	-	14	-
6575	Pemerintah Kota Probolinggo	PPPK Teknis	77	75	75	75	73	-	-	-
6576	Pemerintah Kota Blitar	PPPK Teknis	60	54	54	54	54	-	-	-
6577	Pemerintah Kota Kediri	PPPK Teknis	62	41	41	41	24	-	-	-
6579	Pemerintah Kota Batu	PPPK Teknis	303	246	245	245	46	-	39	-
6100	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	PPPK Teknis	61	55	55	54	3	-	8	-
6101	Pemerintah Kab. Bogor	PPPK Teknis	27	23	23	23	12	-	5	-

KODE	INSTANSI	JENIS PENGADAAN	FORMASI	LULUS PASCA OPTIMALISASI	ISI DRH	USUL MASUK	NIP	TMS	BTS	SK
6102	Pemerintah Kab. Sukabumi	PPPK Teknis	244	195	195	195	-	-	-	-
6103	Pemerintah Kab. Cianjur	PPPK Teknis	232	186	186	185	185	-	-	-
6104	Pemerintah Kab. Bekasi	PPPK Teknis	181	153	153	153	153	-	-	153
6106	Pemerintah Kab. Purwakarta	PPPK Teknis	62	59	59	58	48	-	-	-
6107	Pemerintah Kab. Subang	PPPK Teknis	82	67	67	67	64	-	-	-
6108	Pemerintah Kab. Bandung	PPPK Teknis	144	139	137	137	137	-	-	-
6109	Pemerintah Kab. Sumedang	PPPK Teknis	48	39	39	39	39	-	-	-
6111	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	PPPK Teknis	115	93	93	93	-	-	-	-
6112	Pemerintah Kab. Ciamis	PPPK Teknis	107	89	89	89	89	-	-	-
6113	Pemerintah Kab. Cirebon	PPPK Teknis	83	76	76	76	67	-	-	-
6115	Pemerintah Kab. Indramayu	PPPK Teknis	7	6	6	6	6	-	-	5
6116	Pemerintah Kab. Majalengka	PPPK Teknis	114	73	73	73	9	-	-	-
6117	Pemerintah Kab. Bandung Barat	PPPK Teknis	110	106	106	106	-	-	-	-
6171	Pemerintah Kota Bandung	PPPK Teknis	87	85	85	85	83	-	-	-
6172	Pemerintah Kota Bogor	PPPK Teknis	22	20	19	19	9	-	-	-
6173	Pemerintah Kota Sukabumi	PPPK Teknis	7	7	7	7	7	-	-	-
6174	Pemerintah Kota Cirebon	PPPK Teknis	258	231	231	231	231	-	-	231
6176	Pemerintah Kota Depok	PPPK Teknis	21	20	20	20	20	-	-	-
6177	Pemerintah Kota Cimahi	PPPK Teknis	28	28	28	28	-	-	-	-
6178	Pemerintah Kota Tasikmalaya	PPPK Teknis	9	7	7	7	7	-	-	-
6179	Pemerintah Kota Banjar	PPPK Teknis	29	26	26	26	26	-	-	-
6201	Pemerintah Kab. Serang	PPPK Teknis	70	56	56	56	35	-	18	-
6203	Pemerintah Kab. Lebak	PPPK Teknis	92	71	71	71	35	-	1	-
6271	Pemerintah Kota Tangerang	PPPK Teknis	104	90	90	90	34	-	1	-
6273	Pemerintah Kota Serang	PPPK Teknis	38	35	35	35	35	-	-	5
7200	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	PPPK Teknis	520	415	411	411	402	-	6	-
7202	Pemerintah Kab. Donggala	PPPK Teknis	26	24	24	24	6	-	9	-
7203	Pemerintah Kab. Tolitoli	PPPK Teknis	120	105	104	104	16	-	1	-
7204	Pemerintah Kab. Banggai	PPPK Teknis	39	34	34	34	10	-	-	-
7205	Pemerintah Kab. Buol	PPPK Teknis	70	59	59	41	15	-	2	-
7206	Pemerintah Kab. Morowali	PPPK Teknis	85	68	68	68	34	-	1	-
7207	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	PPPK Teknis	195	168	167	167	1	-	-	-
7208	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	PPPK Teknis	121	77	77	77	7	-	-	-
7209	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	PPPK Teknis	490	355	354	329	49	-	49	-

KODE	INSTANSI	JENIS PENGADAAN	FORMASI	LULUS PASCA OPTIMALISASI	ISI DRH	USUL MASUK	NIP	TMS	BTS	SK
7210	Pemerintah Kab. Sigi	PPPK Teknis	175	135	134	133	71	-	5	-
7211	Pemerintah Kab. Banggai Laut	PPPK Teknis	141	117	117	117	-	-	22	-
7212	Pemerintah Kab. Morowali Utara	PPPK Teknis	162	127	126	126	54	-	7	-
7271	Pemerintah Kota Palu	PPPK Teknis	85	69	69	69	68	-	-	-
7300	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	PPPK Teknis	120	82	82	81	22	-	8	-
7302	Pemerintah Kab. Gowa	PPPK Teknis	35	31	31	28	-	-	28	-
7303	Pemerintah Kab. Wajo	PPPK Teknis	35	22	22	22	22	-	-	-
7305	Pemerintah Kab. Bone	PPPK Teknis	141	116	116	116	84	-	-	-
7307	Pemerintah Kab. Maros	PPPK Teknis	60	50	50	50	24	-	3	-
7309	Pemerintah Kab. Luwu	PPPK Teknis	179	143	143	143	138	-	-	-
7310	Pemerintah Kab. Sinjai	PPPK Teknis	94	87	87	87	67	-	2	-
7312	Pemerintah Kab. Bantaeng	PPPK Teknis	50	-	-	-	-	-	-	-
7313	Pemerintah Kab. Jeneponto	PPPK Teknis	37	31	31	31	31	-	-	-
7314	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	PPPK Teknis	47	35	35	35	35	-	-	-
7316	Pemerintah Kab. Barru	PPPK Teknis	47	35	35	20	-	-	20	-
7317	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	PPPK Teknis	54	51	51	51	7	-	1	-
7318	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	PPPK Teknis	10	10	10	10	10	-	-	10
7319	Pemerintah Kab. Soppeng	PPPK Teknis	70	50	50	50	-	-	-	-
7321	Pemerintah Kab. Enrekang	PPPK Teknis	23	16	16	16	-	-	-	-
7322	Pemerintah Kab. Luwu Utara	PPPK Teknis	152	131	131	131	-	-	-	-
7325	Pemerintah Kab. Luwu Timur	PPPK Teknis	65	56	56	56	56	-	-	-
7326	Pemerintah Kab. Toraja Utara	PPPK Teknis	39	34	34	34	31	-	-	-
7371	Pemerintah Kota Makassar	PPPK Teknis	211	195	195	195	163	-	-	-
7400	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	PPPK Teknis	280	259	259	34	-	-	34	-
7401	Pemerintah Kab. Konawe	PPPK Teknis	76	46	26	26	22	-	3	-
7402	Pemerintah Kab. Buton	PPPK Teknis	69	57	57	57	56	-	-	-
7403	Pemerintah Kab. Muna	PPPK Teknis	19	17	17	17	17	-	-	-
7404	Pemerintah Kab. Kolaka	PPPK Teknis	203	167	167	167	166	-	-	-
7405	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	PPPK Teknis	94	79	79	79	79	-	-	79
7406	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	PPPK Teknis	58	40	40	40	7	-	11	-
7407	Pemerintah Kab. Bombana	PPPK Teknis	125	101	101	101	101	-	-	-
7408	Pemerintah Kab. Wakatobi	PPPK Teknis	12	12	12	12	11	-	1	-
7410	Pemerintah Kab. Buton Utara	PPPK Teknis	188	141	141	135	26	-	18	-
7411	Pemerintah Kab. Konawe Utara	PPPK Teknis	225	173	173	172	115	-	2	-

KODE	INSTANSI	JENIS PENGADAAN	FORMASI	LULUS PASCA OPTIMALISASI	ISI DRH	USUL MASUK	NIP	TMS	BTS	SK
7412	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	PPPK Teknis	21	20	20	20	15	-	4	-
7413	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	PPPK Teknis	36	31	31	31	31	-	-	-
7415	Pemerintah Kab. Buton Tengah	PPPK Teknis	21	17	17	17	17	-	-	-
7471	Pemerintah Kota Kendari	PPPK Teknis	74	65	65	65	1	-	-	-
7800	Pemerintah Provinsi Maluku	PPPK Teknis	103	68	68	68	65	-	-	-
7801	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	PPPK Teknis	167	115	115	115	41	-	33	-
7802	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	PPPK Teknis	184	89	89	89	79	-	2	-
7804	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	PPPK Teknis	162	96	96	96	88	-	-	-
7805	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	PPPK Teknis	190	125	125	125	107	-	1	-
7807	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	PPPK Teknis	66	41	41	41	15	-	4	-
7808	Pemerintah Kab. Buru Selatan	PPPK Teknis	137	89	89	89	74	-	5	-
7809	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	PPPK Teknis	211	114	114	113	87	-	1	-
7871	Pemerintah Kota Ambon	PPPK Teknis	90	56	56	56	47	-	9	-
7872	Pemerintah Kota Tual	PPPK Teknis	188	90	90	90	90	-	-	-
8300	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	PPPK Teknis	22	19	19	19	13	-	-	-
8305	Pemerintah Kab. Majene	PPPK Teknis	37	32	32	32	23	-	7	-
5904	Pemerintah Kab. Lampung Barat	PPPK Teknis	20	16	16	16	7	-	9	-
5906	Pemerintah Kab. Tanggamus	PPPK Teknis	54	46	46	46	45	-	1	-
5907	Pemerintah Kab. Way Kanan	PPPK Teknis	20	19	19	19	18	-	1	-
5911	Pemerintah Kab. Pringsewu	PPPK Teknis	49	39	39	39	33	-	3	-
5912	Pemerintah Kab. Mesuji	PPPK Teknis	9	7	7	7	3	-	4	-
5913	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	PPPK Teknis	16	14	14	14	11	-	3	-
5971	Pemerintah Kota Metro	PPPK Teknis	47	18	17	17	16	-	1	-
6000	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PPPK Teknis	288	242	240	240	12	-	-	-
6600	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	PPPK Teknis	291	132	131	131	-	-	-	-
6602	Pemerintah Kab. Sanggau	PPPK Teknis	119	92	92	6	-	-	-	-
6603	Pemerintah Kab. Sintang	PPPK Teknis	44	39	39	39	38	1	-	-
6604	Pemerintah Kab. Mempawah	PPPK Teknis	62	52	50	50	39	-	11	-
6605	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	PPPK Teknis	234	155	153	152	142	-	5	-
6606	Pemerintah Kab. Ketapang	PPPK Teknis	101	76	76	76	-	-	-	-
6607	Pemerintah Kab. Bengkayang	PPPK Teknis	37	34	34	34	30	-	4	-
6608	Pemerintah Kab. Landak	PPPK Teknis	563	448	448	448	415	-	27	-
6610	Pemerintah Kab. Sekadau	PPPK Teknis	115	100	100	100	89	-	8	-
6611	Pemerintah Kab. Kubu Raya	PPPK Teknis	18	14	14	14	14	-	-	-

KODE	INSTANSI	JENIS PENGADAAN	FORMASI	LULUS PASCA OPTIMALISASI	ISI DRH	USUL MASUK	NIP	TMS	BTS	SK
6612	Pemerintah Kab. Kayong Utara	PPPK Teknis	124	89	89	89	85	-	4	-
6671	Pemerintah Kota Pontianak	PPPK Teknis	82	66	66	66	65	-	-	-
6672	Pemerintah Kota Singkawang	PPPK Teknis	23	11	11	11	10	-	-	-
5200	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	PPPK Teknis	136	91	91	91	-	-	91	-
5203	Pemerintah Kab. Langkat	PPPK Teknis	113	87	87	87	23	-	4	-
5204	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	PPPK Teknis	28	24	24	24	24	-	-	-
5205	Pemerintah Kab. Simalungun	PPPK Teknis	85	79	79	79	12	-	-	-
5207	Pemerintah Kab. Dairi	PPPK Teknis	7	6	6	6	-	-	-	-
5208	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	PPPK Teknis	346	192	191	190	-	-	-	-
5212	Pemerintah Kab. Toba	PPPK Teknis	39	29	29	29	28	-	-	-
5213	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	PPPK Teknis	42	32	32	32	-	-	-	-
5218	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	PPPK Teknis	338	274	273	265	2	-	-	-
5220	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	PPPK Teknis	60	57	57	57	-	-	-	-
5221	Pemerintah Kab. Batubara	PPPK Teknis	31	31	31	31	3	-	-	-
5222	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	PPPK Teknis	21	15	15	15	-	-	15	-
5225	Pemerintah Kab. Nias Utara	PPPK Teknis	2	1	1	1	1	-	-	-
5272	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	PPPK Teknis	23	12	12	12	11	-	-	-
5276	Pemerintah Kota Sibolga	PPPK Teknis	59	53	53	53	52	-	-	-
5278	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	PPPK Teknis	10	7	7	7	7	-	-	-
5500	Pemerintah Provinsi Jambi	PPPK Teknis	22	17	17	17	3	-	4	-
5501	Pemerintah Kab. Batang Hari	PPPK Teknis	61	50	50	50	-	-	-	-
5502	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	PPPK Teknis	38	33	33	29	-	-	-	-
5505	Pemerintah Kab. Kerinci	PPPK Teknis	94	75	75	75	-	-	9	-
5506	Pemerintah Kab. Sarolangun	PPPK Teknis	241	127	127	127	10	-	7	-
5507	Pemerintah Kab. Tebo	PPPK Teknis	85	71	71	71	68	-	1	-
5508	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	PPPK Teknis	14	13	13	13	13	-	-	13
5571	Pemerintah Kota Jambi	PPPK Teknis	665	504	504	503	351	-	10	-
5572	Pemerintah Kota Sungai Penuh	PPPK Teknis	30	24	24	24	-	-	-	-
5600	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	PPPK Teknis	253	184	183	183	1	-	-	-
5601	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	PPPK Teknis	162	131	130	130	-	-	-	-
5602	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	PPPK Teknis	134	92	92	92	11	-	17	-
5603	Pemerintah Kab. Muara Enim	PPPK Teknis	109	102	102	102	-	-	-	-
5604	Pemerintah Kab. Lahat	PPPK Teknis	173	138	138	138	115	-	-	-
5606	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	PPPK Teknis	159	135	135	135	-	-	-	-

KODE	INSTANSI	JENIS PENGADAAN	FORMASI	LULUS PASCA OPTIMALISASI	ISI DRH	USUL MASUK	NIP	TMS	BTS	SK
5608	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	PPPK Teknis	96	76	75	75	-	-	4	-
5609	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	PPPK Teknis	51	38	38	38	-	-	-	-
5610	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	PPPK Teknis	99	87	87	51	-	-	-	-
5611	Pemerintah Kab. Empat Lawang	PPPK Teknis	128	112	112	-	-	-	-	-
5612	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	PPPK Teknis	10	7	7	7	-	-	-	-
5671	Pemerintah Kota Palembang	PPPK Teknis	107	92	91	91	80	-	7	-
5672	Pemerintah Kota Pagar Alam	PPPK Teknis	55	36	36	36	-	-	-	-
5673	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	PPPK Teknis	5	5	5	5	-	-	-	-
5674	Pemerintah Kota Prabumulih	PPPK Teknis	379	259	258	258	99	-	5	-
5675	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	PPPK Teknis	212	147	147	145	-	-	-	-
5700	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	PPPK Teknis	30	27	27	27	-	-	-	-
5701	Pemerintah Kab. Bangka	PPPK Teknis	27	22	22	22	11	-	-	-
5702	Pemerintah Kab. Belitung	PPPK Teknis	61	45	45	45	37	-	-	-
5703	Pemerintah Kab. Bangka Barat	PPPK Teknis	53	43	42	42	4	-	2	-
5704	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	PPPK Teknis	29	20	20	20	-	-	-	-
5705	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	PPPK Teknis	16	13	13	13	-	-	-	-
5706	Pemerintah Kab. Belitung Timur	PPPK Teknis	44	36	36	36	30	-	6	-
5771	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	PPPK Teknis	22	22	22	22	21	-	1	-
5800	Pemerintah Provinsi Bengkulu	PPPK Teknis	8	7	7	-	-	-	-	-
5801	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	PPPK Teknis	73	59	59	59	57	-	-	-
5803	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	PPPK Teknis	46	42	42	42	5	-	-	-
5804	Pemerintah Kab. Kaur	PPPK Teknis	62	53	53	47	-	-	-	-
5806	Pemerintah Kab. Mukomuko	PPPK Teknis	31	26	26	26	5	-	-	-
5809	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	PPPK Teknis	28	24	24	21	13	-	5	-
6701	Pemerintah Kab. Kapuas	PPPK Teknis	49	22	21	21	-	-	-	-
6702	Pemerintah Kab. Barito Utara	PPPK Teknis	101	91	91	91	89	-	-	-
6703	Pemerintah Kab. Barito Selatan	PPPK Teknis	58	53	53	53	53	-	-	-
6704	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	PPPK Teknis	59	53	53	53	-	-	-	-
6705	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	PPPK Teknis	204	145	145	144	137	-	6	-
6707	Pemerintah Kab. Gunung Mas	PPPK Teknis	437	302	302	302	301	-	-	301
6708	Pemerintah Kab. Lamandau	PPPK Teknis	20	16	16	16	16	-	-	-
6709	Pemerintah Kab. Sukamara	PPPK Teknis	55	31	31	31	31	-	-	-
6710	Pemerintah Kab. Murung Raya	PPPK Teknis	219	178	178	178	119	-	-	119
6711	Pemerintah Kab. Katingan	PPPK Teknis	173	119	118	118	118	-	-	118

KODE	INSTANSI	JENIS PENGADAAN	FORMASI	LULUS PASCA OPTIMALISASI	ISI DRH	USUL MASUK	NIP	TMS	BTS	SK
6712	Pemerintah Kab. Seruyan	PPPK Teknis	91	73	73	73	-	-	-	-
6713	Pemerintah Kab. Barito Timur	PPPK Teknis	18	13	13	13	-	-	-	-
6771	Pemerintah Kota Palangka Raya	PPPK Teknis	103	84	84	84	73	-	-	-
6800	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	PPPK Teknis	322	217	205	205	5	-	1	-
6801	Pemerintah Kab. Banjar	PPPK Teknis	384	280	280	280	277	-	2	-
6802	Pemerintah Kab. Tanah Laut	PPPK Teknis	67	63	63	63	-	-	-	-
6803	Pemerintah Kab. Tapin	PPPK Teknis	63	49	49	49	49	-	-	-
6804	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	PPPK Teknis	109	70	70	70	65	-	2	-
6805	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	PPPK Teknis	55	41	41	41	4	-	-	-
6806	Pemerintah Kab. Barito Kuala	PPPK Teknis	99	82	82	82	66	-	1	-
6807	Pemerintah Kab. Tabalong	PPPK Teknis	48	43	43	43	43	-	-	42
6808	Pemerintah Kab. Kotabaru	PPPK Teknis	35	34	33	33	-	-	-	-
6809	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	PPPK Teknis	86	73	73	-	-	-	-	-
6810	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	PPPK Teknis	116	52	52	52	-	-	-	-
6811	Pemerintah Kab. Balangan	PPPK Teknis	59	46	46	46	46	-	-	-
6871	Pemerintah Kota Banjarmasin	PPPK Teknis	38	28	28	28	12	-	-	-
6872	Pemerintah Kota Banjarbaru	PPPK Teknis	44	26	25	25	25	-	-	-
6900	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	PPPK Teknis	334	227	222	222	67	-	-	-
6902	Pemerintah Kab. Paser	PPPK Teknis	75	63	63	63	-	-	-	-
6907	Pemerintah Kab. Kutai Barat	PPPK Teknis	82	39	39	39	35	-	-	-
6908	Pemerintah Kab. Kutai Timur	PPPK Teknis	482	314	312	312	-	-	1	-
6910	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	PPPK Teknis	79	60	60	60	60	-	-	-
6971	Pemerintah Kota Samarinda	PPPK Teknis	20	20	20	-	-	-	-	-
6972	Pemerintah Kota Balikpapan	PPPK Teknis	96	49	49	49	49	-	-	-
6973	Pemerintah Kota Bontang	PPPK Teknis	136	113	113	112	112	-	-	112
8401	Pemerintah Kab. Bulungan	PPPK Teknis	78	56	56	56	7	-	-	-
8402	Pemerintah Kab. Malinau	PPPK Teknis	6	4	4	4	4	-	-	-
8403	Pemerintah Kab. Nunukan	PPPK Teknis	25	15	15	15	-	-	15	-
7500	Pemerintah Provinsi Bali	PPPK Teknis	251	216	215	215	186	-	2	-
7502	Pemerintah Kab. Jembrana	PPPK Teknis	78	49	49	49	43	-	3	-
7503	Pemerintah Kab. Klungkung	PPPK Teknis	64	60	60	60	36	-	2	-
7507	Pemerintah Kab. Badung	PPPK Teknis	218	177	177	177	134	-	-	-
7571	Pemerintah Kota Denpasar	PPPK Teknis	105	86	86	86	84	-	-	84
7600	Pemerintah Provinsi NTB	PPPK Teknis	173	146	145	145	89	-	6	-

KODE	INSTANSI	JENIS PENGADAAN	FORMASI	LULUS PASCA OPTIMALISASI	ISI DRH	USUL MASUK	NIP	TMS	BTS	SK
7601	Pemerintah Kab. Lombok Barat	PPPK Teknis	255	207	207	207	11	-	2	-
7602	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	PPPK Teknis	51	39	39	39	21	-	1	-
7603	Pemerintah Kab. Lombok Timur	PPPK Teknis	98	92	92	92	92	-	-	92
7604	Pemerintah Kab. Bima	PPPK Teknis	241	186	186	186	38	-	11	-
7605	Pemerintah Kab. Sumbawa	PPPK Teknis	74	68	68	68	42	-	1	-
7606	Pemerintah Kab. Dompu	PPPK Teknis	60	58	58	58	-	-	-	-
7607	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	PPPK Teknis	187	138	138	138	110	-	5	-
7671	Pemerintah Kota Mataram	PPPK Teknis	26	24	24	24	24	-	-	24
7672	Pemerintah Kota Bima	PPPK Teknis	131	119	119	119	73	-	7	-
7701	Pemerintah Kab. Kupang	PPPK Teknis	72	59	59	59	26	-	4	-
7703	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	PPPK Teknis	195	97	97	97	-	-	-	-
7704	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	PPPK Teknis	82	56	56	56	51	-	-	-
7705	Pemerintah Kab. Alor	PPPK Teknis	12	9	9	9	8	-	1	-
7706	Pemerintah Kab. Sikka	PPPK Teknis	98	66	66	66	16	-	17	-
7707	Pemerintah Kab. Flores Timur	PPPK Teknis	347	230	229	229	162	-	3	-
7710	Pemerintah Kab. Manggarai	PPPK Teknis	144	86	85	85	-	-	-	-
7711	Pemerintah Kab. Sumba Timur	PPPK Teknis	143	112	112	112	-	-	1	-
7712	Pemerintah Kab. Sumba Barat	PPPK Teknis	95	73	73	73	-	-	-	-
7715	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	PPPK Teknis	173	130	130	129	41	-	6	-
7716	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	PPPK Teknis	128	75	74	74	4	-	4	-
7717	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	PPPK Teknis	55	47	47	47	45	-	2	-
7718	Pemerintah Kab. Nagekeo	PPPK Teknis	148	79	79	79	45	-	2	-
7720	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	PPPK Teknis	49	34	34	34	27	-	-	-
7721	Pemerintah Kab. Malaka	PPPK Teknis	69	23	23	23	23	-	-	-
7000	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	PPPK Teknis	500	238	238	-	-	-	-	-
7001	Pemerintah Kab. Minahasa	PPPK Teknis	28	26	26	26	-	-	-	-
7002	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	PPPK Teknis	75	53	53	-	-	-	-	-
7003	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	PPPK Teknis	17	11	11	11	-	-	-	-
7004	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	PPPK Teknis	56	49	49	49	-	-	2	-
7006	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	PPPK Teknis	54	45	45	45	-	-	2	-
7007	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	PPPK Teknis	100	67	67	67	-	-	-	-
7008	Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	PPPK Teknis	42	29	29	29	-	-	3	-
7012	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	PPPK Teknis	53	44	44	44	-	-	-	-
7071	Pemerintah Kota Manado	PPPK Teknis	49	40	39	39	-	-	25	-

KODE	INSTANSI	JENIS PENGADAAN	FORMASI	LULUS PASCA OPTIMALISASI	ISI DRH	USUL MASUK	NIP	TMS	BTS	SK
7072	Pemerintah Kota Bitung	PPPK Teknis	52	47	47	47	-	-	23	-
7073	Pemerintah Kota Tomohon	PPPK Teknis	133	114	114	114	-	-	-	-
7074	Pemerintah Kota KotaMobagu	PPPK Teknis	15	8	8	8	-	-	-	-
7102	Pemerintah Kab. Boalemo	PPPK Teknis	15	12	12	12	-	-	-	-
7103	Pemerintah Kab. Pohuwato	PPPK Teknis	90	74	74	74	-	-	-	-
7104	Pemerintah Kab. Bone Bolango	PPPK Teknis	27	27	27	27	-	-	-	-
7171	Pemerintah Kota Gorontalo	PPPK Teknis	91	78	78	78	-	-	13	-
7900	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	PPPK Teknis	167	79	79	79	-	-	-	-
7901	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	PPPK Teknis	20	20	20	20	-	-	18	-
7902	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	PPPK Teknis	103	82	82	82	-	-	-	-
7904	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	PPPK Teknis	150	117	117	109	-	-	-	-
7905	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	PPPK Teknis	67	53	53	52	-	-	-	-
7906	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	PPPK Teknis	76	47	46	46	-	-	9	-
7907	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	PPPK Teknis	86	38	38	38	-	-	-	-
7971	Pemerintah Kota Ternate	PPPK Teknis	114	104	102	102	-	-	5	-
5300	Pemerintah Provinsi Riau	PPPK Teknis	149	112	112	112	61	-	20	-
5301	Pemerintah Kab. Kampar	PPPK Teknis	147	138	138	138	83	-	-	-
5302	Pemerintah Kab. Bengkalis	PPPK Teknis	203	130	129	129	10	-	4	-
5307	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	PPPK Teknis	245	202	202	201	141	-	2	-
5308	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	PPPK Teknis	129	86	86	86	52	-	2	-
5309	Pemerintah Kab. Siak	PPPK Teknis	68	49	49	49	23	-	2	-
5371	Pemerintah Kota Pekanbaru	PPPK Teknis	68	44	44	44	35	-	2	-
5400	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	PPPK Teknis	43	36	35	35	23	-	1	-
5401	Pemerintah Kab. Agam	PPPK Teknis	44	33	33	32	15	-	6	-
5405	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	PPPK Teknis	275	208	208	208	-	-	-	-
5407	Pemerintah Kab. Tanah Datar	PPPK Teknis	47	37	37	37	23	-	-	-
5411	Pemerintah Kab. Dharmasraya	PPPK Teknis	39	32	32	32	20	-	1	-
5472	Pemerintah Kota Padang Panjang	PPPK Teknis	21	19	19	19	8	-	5	-
5473	Pemerintah Kota Sawahlunto	PPPK Teknis	278	200	200	200	129	-	-	-
5475	Pemerintah Kota Padang	PPPK Teknis	126	118	118	118	55	-	20	-
5476	Pemerintah Kota Payakumbuh	PPPK Teknis	81	78	78	78	36	-	3	-
8102	Pemerintah Kab. Karimun	PPPK Teknis	312	150	150	-	-	-	-	-
8103	Pemerintah Kab. Natuna	PPPK Teknis	70	58	58	58	57	-	-	-
8104	Pemerintah Kab. Lingga	PPPK Teknis	14	14	14	14	13	-	-	-

KODE	INSTANSI	JENIS PENGADAAN	FORMASI	LULUS PASCA OPTIMALISASI	ISI DRH	USUL MASUK	NIP	TMS	BTS	SK
8105	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	PPPK Teknis	60	52	52	52	23	-	28	-
8171	Pemerintah Kota Batam	PPPK Teknis	399	288	288	254	76	-	33	-
8172	Pemerintah Kota Tanjungpinang	PPPK Teknis	254	168	168	168	64	-	5	-
5100	Pemerintah Aceh	PPPK Teknis	660	535	534	534	185	-	16	-
5101	Pemerintah Kab. Aceh Besar	PPPK Teknis	25	17	17	17	17	-	-	-
5102	Pemerintah Kab. Pidie	PPPK Teknis	48	42	42	42	42	-	-	-
5103	Pemerintah Kab. Aceh Utara	PPPK Teknis	7	7	7	7	2	-	-	-
5104	Pemerintah Kab. Aceh Timur	PPPK Teknis	72	62	62	62	59	-	1	-
5105	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	PPPK Teknis	27	22	22	22	21	-	-	-
5106	Pemerintah Kab. Aceh Barat	PPPK Teknis	98	73	73	73	73	-	-	-
5107	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	PPPK Teknis	40	37	37	37	36	-	-	-
5109	Pemerintah Kab. Simeulue	PPPK Teknis	60	51	51	51	1	-	-	-
5110	Pemerintah Kab. Bireuen	PPPK Teknis	54	52	52	52	52	-	-	-
5111	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	PPPK Teknis	137	114	114	114	90	-	7	-
5113	Pemerintah Kab. Gayo Lues	PPPK Teknis	99	79	79	79	-	-	-	-
5114	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	PPPK Teknis	200	123	123	123	3	-	-	-
5115	Pemerintah Kab. Nagan Raya	PPPK Teknis	28	27	27	27	3	-	-	-
5116	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	PPPK Teknis	53	41	41	41	2	-	-	-
5117	Pemerintah Kab. Bener Meriah	PPPK Teknis	5	4	4	4	2	-	-	-
5118	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	PPPK Teknis	10	8	8	8	-	-	-	-
5171	Pemerintah Kota Sabang	PPPK Teknis	2	2	2	2	-	-	-	-
5173	Pemerintah Kota Langsa	PPPK Teknis	26	25	25	25	25	-	-	-